

Perumusan Kebijakan Publik dalam Menggali Akar Kemiskinan

SLAMET ROSYADI & TOBIRIN

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
Jl. HR Bunyamin No. 992 Purwokerto Jateng. Telp/Fax. 0281-636992

Abstract: The objective of this research was to identify and analyze deeply various poverty roots of problem developing in both coastal and agriculture area as basis of formulating public policy in poverty alleviation. Qualitative with multicase study method was applied in two villages in order to gain complete description concerning roots of rural poverty. In-depth interview and observation were used to collect qualitative data. Informants taken from farmer and fisherman leading actors, development agencies from district to village level, and other community organization actors were purposively selected followed by snow-ball sampling in order to get more comprehensive data. Data was analyzed by interactive model consisting of interactive activities from data collection, reduction, display and verification/conclusion drawing. Results of this study show that roots of poverty in coastal villages are more complicated than those of agriculture one. This circumstance indicates that coastal village area is the primary pocket of poverty. Some causes of poverty that should be paid attention by policy makers are low of education level, disadvantage development policy and marketing system for farmers as well as fishermen, and degraded coastal environment. Therefore, developmental efforts aimed at alleviating the poverty should be directed to improve the primary roots of poverty problem.

Key words: *agriculture village, coastal village, policy formulation, poverty alleviation, roots of poverty.*

Upaya penanggulangan kemiskinan sudah mendapatkan perhatian pemerintah sejak masa rejim Orde Baru. Berbagai pendekatan telah dikembangkan baik dari sisi kelembagaan, wilayah, maupun strategi khusus. Apalagi strategi pertumbuhan ekonomi yang dipilih oleh rejim Orde Baru diarahkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Disamping itu, berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah saat itu dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal, Program Pengembangan Kecamatan, Jaring Pengaman Sosial telah diimplementasikan oleh pemerintah, utamanya dengan desa sebagai muaranya. Alasannya, fenomena kemiskinan mudah ditemukan di wilayah pedesaan (Ashley dan Maxwell,

2001:395; McCulloch, et al, 2007:1). Namun demikian, problem kemiskinan di pedesaan tetap belum dapat diatasi oleh program-program tersebut. Laju kemiskinan di wilayah pedesaan bahkan menunjukkan lonjakan yang sangat drastis. Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pedesaan tahun 2006 (21,90 persen) lebih tinggi 2,12 persen dibandingkan tahun 1996 (19,78 persen) (BPS, 2007). Selanjutnya pada tahun 2009, menurut BPS dilaporkan bahwa penduduk miskin pedesaan hanya turun 1,5 persen atau 1,57 juta jiwa yang terentaskan dari jurang kemiskinan. Ini berarti bahwa selama puluhan tahun dana triliunan rupiah dan berbagai macam program pengentasan kemiskinan tidak banyak mengubah komposisi penduduk miskin di Indonesia. Dengan kata lain, penduduk pedesaan mendominasi kemiskinan dengan 20,62 juta jiwa atau 63,38 persen dari

total penduduk. Bahkan beberapa peneliti mensinyalir telah terjadi proses pemiskinan masyarakat pedesaan di Indonesia (Sujarwoto dan Yumarni, 2007:7).

Fenomena kemiskinan juga ditemukan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Brebes menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes (Brebes Dalam Angka Tahun 2007, dari jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang saat ini sebanyak 1.727.708 jiwa adalah hampir sepertiganya atau 708.360.28 jiwa (109.168 KK) merupakan masyarakat miskin. Dari jumlah penduduk 1,7 juta jiwa itu, sebanyak 25.510 orang bermata pencaharian sebagai nelayan, 315.773 orang petani, 436.773 orang buruh tani, 36.742 orang buruh industri, dan 66.623 orang buruh bangunan.

Dari 17 kecamatan yang ada, sebanyak lima kecamatan dihuni oleh para nelayan yang memiliki tingkat kehidupan yang masih memprihatinkan, masing-masing di Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Kecamatan Losari. Tidak berbeda jauh dengan kemiskinan nelayan, wilayah pertanian di Kabupaten Brebes juga sarat dengan persoalan kemiskinan. Meskipun berbagai program pembangunan baik dari Pusat maupun Daerah telah diimplementasikan, persoalan kemiskinan hingga saat ini tidak kunjung dapat diatasi secara signifikan. Kegagalan tersebut dapat bersumber dari dua faktor: Pertama pemahaman para pengambil kebijakan mengenai definisi masalah kemiskinan sebagai semata-mata ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan material dasarnya (Mawardi dan Sumartono, 2003:1). Program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung mereduksi derajat kemanusiaan seperti menyetarakan kemiskinan dengan beberapa kilo beras per hari dan mengabaikan aspirasi dan konsekuensinya mengabaikan kebutuhan masyarakat miskin itu sendiri; dan Kedua paradigma dan pemahaman yang kurang tepat tentang penyebab kemiskinan. Kemiskinan tidak lagi hanya dipahami sebagai masalah yang dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan multidimensional. Konsekuensinya, pilihan kebijakan pengentasan

kemiskinan harus diformulasikan secara komprehensif dan memperhatikan berbagai kaitan antar kebijakan lain yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan (Mawardi dan Sumartono, 2003:1).

Dalam konteks studi formulasi kebijakan, pilihan kebijakan pengentasan kemiskinan tertentu merupakan hasil konversi *input* menjadi *output* (Easton, 1992:184). Input kebijakan bisa berasal dari lingkungan kebijakan yang menyebabkan munculnya masalah kebijakan seperti aspirasi dan tuntutan masyarakat yang belum diakomodasi oleh sistem kebijakan. Dengan kata lain, *input* kebijakan berperan sebagai arus informasi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan pilihan solusi kebijakan apa yang akan diambil terhadap masalah tertentu seperti masalah kemiskinan. Mengacu pada asumsi teori tersebut, memahami lingkungan kebijakan sebagai sumber input perumusan kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif.

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini berorientasi pada permasalahan sejauh mana formulasi kebijakan dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan tidak lagi hanya dipahami dari satu perspektif, tetapi merupakan masalah yang kompleks. Dengan pemahaman seperti ini, rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan berbagai sebab kemiskinan agar diperoleh pilihan program yang rasional. Atas dasar permasalahan tersebut, studi ini utamanya bertujuan untuk mengidentifikasi akar kemiskinan dalam perspektif multidimensional baik di pedesaan berkarakter pertanian maupun pesisir sebagai input dalam formulasi kebijakan. Perspektif multidimensional disini dikembangkan dari studi Bradshaw (2007:10-11) dan Kusnadi (2006:19) yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari level individu, budaya, struktur ekonomi dan politik, dan ekologi.

METODE

Penelitian ini dilakukan selama Juni-September 2008 di dua desa. Lokasi penelitian diambil dengan teknik gugus bertahap dengan memperhatikan kepadatan penduduk dan rumah

tangga miskin penerima bantuan langsung tunai (BLT) di wilayah pedesaan di Kabupaten Brebes, yaitu Desa Pamulihan Kecamatan Larangan mewakili desa agraris dan Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari mewakili desa pesisir.

Sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian maka, sumber data penelitian ini adalah: Pertama informan. Pemilihan informan didasari dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subyek penelitian yang menguasai sumber permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian atau disebut juga informan kunci. Namun demikian, informan yang dipilih dapat menunjuk informan lain yang lebih tahu, maka informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data (*snow-ball sampling*); Kedua tempat dan peristiwa, meliputi lokasi penelitian, sarana dan prasarana yang tersedia, keadaan sosial ekonomi dan budaya, perilaku serta kejadian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; Ketiga tim pelaksana kebijakan dari tingkat kabupaten dan desa, organisasi pertanian, organisasi nelayan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dan tokoh masyarakat; dan Keempat dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan fokus penelitian.

Berdasar pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Dalam penelitian ini, digunakan analisis data model interaktif. Ada tiga komponen penting dalam model interaktif, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga kegiatan analisis ini dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Artinya, proses analisis data dimungkinkan bergerak bolak-balik diantara ketiga kegiatan analisis tersebut atau kembali ke tahap pengumpulan data hingga terbangun deskripsi masalah secara lengkap.

HASIL

Akar Kemiskinan pada Komunitas Agraris

Hingga saat ini, sektor pertanian masih memegang peranan cukup penting dalam struktur

perekonomian Desa Pamulihan Kecamatan Larangan. Potensi pertanian yang tersedia di Desa Pamulihan memberikan kontribusi yang besar dalam proses pembangunan ekonomi lokal. Data BPS Tahun 2007. Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa 42,7 persen masyarakat Desa Pamulihan sangat bergantung pada pekerjaan di sektor pertanian baik sebagai petani maupun buruh tani. Jenis tanaman pertanian yang dominan dikembangkan adalah padi dan bawang merah. Kapasitas produksi padi per hektar saat ini telah mencapai 67,8 kwintal dengan total produksi 43.663,2 kwintal. Sementara itu, rata-rata produksi bawang merah mencapai 92,8 kwintal per hektar dengan kapasitas produksi tahun ini sebanyak 107.927,2 kwintal per hektar.

Namun demikian, dari aspek teknis dukungan sarana pengairan untuk sawah di Desa Pamulihan sangat terbatas. Petani lebih mengandalkan teknologi dan sumber pengairannya dari teknologi pompa air mesin, sistem pengairan sederhana, dan tadah hujan karena belum tersedianya waduk dan dam serta irigasi teknis maupun setengah teknis. Akibatnya, kapasitas produksi baik padi dan bawang merah juga terbatas dan sangat rentan terhadap faktor alam seperti curah hujan, ketersediaan air tanah maupun sungai.

Dalam upaya menjelaskan mengapa petani menjadi kelompok miskin berdasarkan penelitian diidentifikasi beberapa gambaran akar penyebab kemiskinan masyarakat petani Desa Pamulihan.

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia

Perhatian masyarakat terhadap pendidikan di desa Pamulihan masih buruk, terbukti hampir seluruh masyarakat Pamulihan masih banyak yang buta huruf sehingga menjadi target program KKN (kuliah kerja nyata) dari Universitas-universitas dengan program PBA (pemberantasan Buta Huruf). Buruknya potret pendidikan masyarakat petani juga ditandai dengan fasilitas pendidikan di desa Pamulihan masih kurang. Untuk sekolah dasar tersedia 2 SD di Dusun Sembung dan Pamulangan, untuk Setingkat SMP terdapat 1 sekolah yang terletak di Dusun Pamulihan.

Dari pengamatan di lapangan, sebagian besar petani yang mempunyai keterbatasan ekonomi terpaksa meminta anaknya untuk berhenti sekolah untuk ikut membantu orang tua untuk bekerja dengan menggembala ternak milik orang lain selama 2,5 tahun dan sebagai imbalan mendapat 1 ekor anak sapi. Namun, ada juga yang menggembala hewan ternak milik sendiri.

Ketidakterbatasan masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal ternyata tidak diikuti dengan pembukaan akses pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan. Disamping secara infrastruktur tidak tersedia lembaga kursus, hingga sekarang belum pernah ada pelatihan mengenai pertanian maupun kewirausahaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Kesulitan Melakukan Diversifikasi Usaha Pertanian

Kesulitan petani dalam melakukan diversifikasi pertanian sangat tinggi karena kondisi geografis dan ketrampilan yang dimiliki sangat minim. Kondisi lahan pertanian yang relatif kering disebabkan oleh letak desa tersebut yang berada diperbukitan yang tandus dan tidak adanya sistem irigasi. Hal ini membuat petani tidak dapat melakukan diversifikasi pertanian, karena hanya dapat ditanam oleh tanaman palawija (jagung, cabai, bawang, kacang hijau). Lahan pertanian yang mengandalkan hujan (tadah hujan) membuat petani sering mengalami gagal panen, terutama untuk komoditas bawang.

Ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh petani tentang pertanian hanya terbatas pada komoditas pertanian yang sedang mereka tekuni. Ini disebabkan karena tidak adanya program penyuluhan di desa tersebut. Pengetahuan dan ketrampilan petani didapatkan dengan cara turun temurun.

Ketergantungan yang Tinggi Terhadap Pekerjaan Petani

Ketergantungan masyarakat pada pekerjaan petani sangat tinggi, karena tidak adanya alternatif pekerjaan selain bertani. Masyarakat yang bekerja sebagai petani tidak dapat beralih pada pekerjaan lain karena masalah rendahnya pendidikan dan modal yang mereka miliki.

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan petani masih jauh dibawah standar. Dalam beberapa panen, misalnya, petani masih sering banyak mengalami kerugian. Apalagi kalau terjadi gagal panen. Disamping harus menutupi kerugian karena gagal panen, petani juga harus menanggung biaya kehidupan rumah tangganya. Akibatnya, petani harus berhutang untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya.

Kondisi ini berlangsung terus-menerus karena memang tidak ada alternatif lain bagi masyarakat pamulihan selain aktivitas bertani. Beberapa dari warga yang mencoba mengadu nasib ke kota besar juga tidak berdampak terhadap perbaikan ekonomi, karena disana mereka juga bekerja sebagai buruh kasar sehingga banyak dari mereka yang memilih kembali lagi ke desanya sebagai petani.

Kebijakan Pembangunan yang tidak Memberdayakan Petani

Kebijakan pembangunan yang kurang memberdayakan petani khususnya yang dirasakan oleh petani di Desa Pamulihan adalah subsidi pupuk dan obat yang dirasa kurang tepat sasaran. Hal ini dikarenakan petani merasa kesulitan dalam mendapatkan pupuk dan obat yang telah disubsidi. Dalam hal penyaluran pupuk oleh pemerintah kepada petani melalui distributor, dinilai oleh petani sebagai penyebab mahalannya dan kelangkaan pupuk. Petani menginginkan perubahan pola distribusi pupuk oleh pemerintah, yang tadinya melalui distributor dialihkan kepada kelompok tani untuk dapat langsung disalurkan kepada petani, namun langkah ini juga dinilai masih kurang efektif. Penyaluran pupuk lewat kelompok tani hanya dapat diperoleh petani yang menjadi anggota kelompok tani tersebut.

Program BLT juga dirasa oleh petani kurang bermanfaat, karena yang mereka butuhkan adalah modal, baik berupa hibah maupun pinjaman. Program BLT dirasa kurang bermanfaat karena hanya bersifat sementara dan hanya dapat digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Yang petani butuhkan adalah bagaimana untuk dapat mengolah lahan pertanian mereka dengan mudah untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Sistem Pemasaran Hasil Pertanian yang menguntungkan salah satu pihak.

Sistem pemasaran yang dilakukan adalah pemasaran hasil panen melalui pedagang perantara atau yang sering mereka sebut sebagai tengkulak. Hasil panen yang berupa bawang mereka jual kepada tengkulak sebesar Rp. 2000-2500 /kg, namun di bawah harga pasaran yang berlaku. Sistem ini dinilai kurang menguntungkan bagi petani, karena modal dan tenaga yang mereka keluarkan untuk mengolah tidak sebanding dengan hasil penjualan. Sebaliknya, sistem ini sangat menguntungkan bagi para tengkulak karena mereka mendapatkan untung yang lebih besar. Bahkan menurut para informan, harga yang diterima seringkali tidak seimbang dengan modal dan pengorbanan yang dia keluarkan, dan bahkan seringkali rugi (*tombok*). Untuk komoditas pengganti bawang seperti jagung, konsumen atau pembeli langsung membeli kepada petani di Pamulihan, sehingga relatif tidak merugikan petani.

Terbatasnya Peluang Kerja di Sektor Non-Pertanian

Keterbatasan peluang kerja di luar pertanian sangat tinggi. Hal ini diakibatkan keterbatasan pendidikan, ketrampilan dan modal yang mereka miliki. Karena ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat hanya bertani, profesi alternatif pada waktu kemarau yang tersedia hanyalah menjadi kuli bangunan di kota besar. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Kepala Desa Pamulihan bahwa pada musim kemarau banyak petani yang mengalami gagal panen dan rugi karena kekurangan air dan mahalnya pupuk dan obat-obatan pertanian. Para petani yang tidak lagi memiliki modal untuk mengatasi gagal panen lebih memilih menjadi kuli bangunan di kota besar seperti Jakarta.

Dengan adanya pernyataan tersebut diatas, semakin memperkuat bahwa keterbatasan pendidikan dan modal membuat petani semakin kesulitan dalam beralih profesi.

Akar Kemiskinan pada Komunitas Nelayan

Desa Sawojajar merupakan salah satu desa nelayan di Kabupaten Brebes. Ia terletak di Kecamatan Wanasari sekitar 8 Km arah utara Kota

Brebes, dengan luas wilayah 1.841 Ha terbagi ke dalam 4 dusun dengan 10 RW dan 52 RT. Pada pertengahan tahun 1970-an desa ini merupakan salah satu desa dengan jumlah nelayan terbesar di Pantai Utara Jawa. Namun saat ini kondisinya berubah. Hampir mayoritas penduduknya sudah beralih ke-mata pencaharian non-nelayan. Berdasarkan data monografi Desa Sawojajar tahun 2007 hanya sekitar 2639 jiwa saja atau 24 % dari total penduduk Sawojajar yang tetap menjadikan nelayan sebagai sumber mata pencaharian utama. Sebagian besar penduduk kini menekuni bidang pertanian dan tambak, tercatat sekitar 4275 jiwa atau 40 % penduduk memiliki mata pencaharian di kedua sektor tersebut, baik sebagai pemilik lahan maupun buruh (pekerja).

Kemiskinan Nelayan Sawojajar tergambar dari kehidupan sehari-hari mereka, penghasilan yang tidak menentu tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, bahkan di musim paceklik banyak nelayan yang menganggur dan mengantungkan hidupnya dari utang. Padahal, banyak diantara mereka yang jumlah anggota keluarganya lebih dari 5 orang. Ketika hasil tangkapan melimpah, penghasilan mereka hanya digunakan untuk untuk menutupi hutang. Peran istri dan anak nelayan di sektor publik adalah dengan bekerja serabutan sebagai buruh tambak, buruh pengupas kulit kerang, penjual es balok, sampai menjadi TKI keluar negeri.

Sawojajar sebagai salah satu desa nelayan di wilayah pesisir Pantai Utara Pulau Jawa pada umumnya menghadapi persoalan yang hampir sama, yaitu nelayan yang bisa bertahan atau meningkat kesejahteraan hidupnya adalah nelayan yang bermodal besar. Jumlah Nelayan yang memiliki kemampuan jelajah penangkapan hingga ke lepas pantai (*off-shore*) relatif kecil. Berikut ini adalah gambaran akar permasalahan kemiskinan nelayan Desa Sawojajar.

Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia

SDM merupakan salah satu penyebab internal akar permasalahan kemiskinan di desa nelayan. Masyarakat nelayan identik dengan kualitas modal manusia yang rendah. Keterbatasan tingkat pendidikan berdampak pada pemahaman

teknik penangkapan dan pemanfaatan hasil tangkapan. Nelayan sering mengambil jalan pintas untuk mendapatkan hasil produksi tangkapan seperti menggunakan bom ikan/dinamit, racun ikan atau potasium. Nelayan tidak pernah memikirkan dampak di masa yang akan datang bahwa ikan yang di bom atau di potasium secara alamiah akan merusak ekosistem laut yang berakibat pada hilangnya bibit-bibit ikan.

Sedangkan dari aspek pasca penangkapan, nelayan tidak mempunyai inovasi produksi ikan sehingga berdampak pada nilai jual hasil penangkapan. Mereka lebih memilih menjual langsung kepada perusahaan atau pengepul ikan meskipun dengan nilai yang sangat rendah. Atau, seringkali nelayan terjebak pada bakul-bakul ikan yang mudah dijumpai ketimbang menjual di tempat pelelangan ikan (TPI). Apabila kondisinya demikian, maka akan terjadi mata rantai permasalahan yang bersumber pada rendahnya tingkat pendidikan, berkaitan dengan kualitas SDM di Desa Sawojajar, berdasarkan data demografi Desa Sawojajar tahun 2007 di lihat dari tingkat pendidikan, penduduk yang belum tamat SD mencapai 1.258 jiwa dan yang tamat SD/MI mencapai 5.237 jiwa, sedangkan yang memiliki pendidikan tinggi hanya 41 jiwa yang berpendidikan S1 dan 150 jiwa yang berpendidikan D3/Sarjana Muda. Di lihat dari segi pendidikan kualitas pendidikan cukup signifikan, bahwa tingkat pendidikan masih rendah. Hal ini berdasarkan perbandingan penduduk yang berpendidikan tinggi dengan penduduk yang berpendidikan rendah mengalami kesenjangan yang tajam.

Modal dan Teknologi Penangkapan

Nelayan dalam memproduksi ikan memerlukan input produksi atau faktor produksi. Adapun wujud dari input produksi berupa modal (Uang), alat tangkap dan peralatan melaut lainnya seperti kapal/perahu. Kebanyakan nelayan di Indonesia menjadikan modal sebagai persoalan yang sangat serius. Hal ini dikarenakan nelayan memiliki keterbatasan modal. Nelayan masih mengandalkan modal dari juragan sehingga hasil produksinya tidak bisa dinikmati secara optimal oleh nelayan yang bersangkutan. Belum lagi diperparah oleh posisi nelayan yang 80% masih sebagai buruh

tangkap sehingga menyebabkan hasil (pendapatan) nelayan menjadi rendah.

Permasalahan yang hampir terjadi di Desa Nelayan, seperti halnya yang terjadi di Desa Sawojajar, modal sebagian besar bersumber pada bakul, tabungan sendiri, lembaga ekonomi simpan pinjam, KUD. Kondisi inilah yang seringkali merugikan nelayan. Para nelayan tidak dapat berbuat banyak ketika menjual hasil tangkapan-nya. Bakul (tengkulak) dengan mudah menentukan harga karena nelayan sudah berhutang. Kondisi ini tentunya merugikan para nelayan di Desa Sawojajar.

Belum berfungsinya TPI secara optimal mengakibatkan para nelayan tidak diuntungkan dengan sistem utang-piutang yang dilakukan nelayan untuk modal menangkap ikan. Seperti yang ditegaskan oleh informan nelayan bahwa modal sebagian besar ia dapatkan dari bakul dengan konsekuensi semua hasil tangkapan di jual hanya kepada *bakul*.

Kondisi keterbatasan modal menjadi hal yang dilematis. Nelayan membutuhkan modal yang cepat, namun lembaga resmi seperti KUD dan perbankan tidak dapat memenuhi hal tersebut. Lembaga seperti LEPM Mandiri yang menjalin kerjasama dengan BUKOPIN yang telah didirikan untuk penyaluran modal tidak dapat memiliki peran optimal. Prosedur yang berbelit berkaitan dengan "agunan" mengakibatkan munculnya ketidakpuasan oleh karenanya menemui para bakul merupakan cara termudah. Hal ini diakui oleh DKP bahwa masalah permodalan merupakan hal yang sulit, peran LEPM Mandiri belum optimal karena prosedur pinjaman yang tidak mengakui bukti kepemilikan perahu. Akibatnya nelayan mengalami kesulitan permodalan. Sehingga kondisi ini seringkali dimanfaatkan bagi para pemilik modal besar untuk mempermainkan nasib para nelayan.

Berkaitan dengan teknologi penangkapan ikan nelayan di Desa Sawojajar dapat dikatakan masih menggunakan alat yang sederhana. Sebagian besar nelayan menggunakan alat tangkap buatan sendiri berupa jaring (arad) dan badut. Sementara kapal yang digunakan oleh nelayan 15 %

menggunakan kapal besar dan sisanya 85 % menggunakan kapal kecil. Akibatnya jelajah kapal-kapal nelayan untuk menangkap ikan terbatas pada perairan yang tidak memiliki *hot spot* ikan. Padahal di wilayah pesisir pantai utara kondisinya sudah *overfishing* akibatnya nelayan seringkali tidak mendapatkan hasil yang memuaskan.

Diversifikasi Usaha Penangkapan

Diversifikasi penangkapan tidak mudah dilakukan karena memerlukan tingkat keahlian tertentu yang didapat melalui proses yang panjang dan modal yang besar. Seorang nelayan pancing ikan tongkol, cakalang atau layang tidak bisa dengan segera mengubah kegiatannya menjadi nelayan udang. Keduanya memerlukan peralatan dan metode kerja yang berbeda sehingga membutuhkan proses belajar yang relatif lama. Demikian halnya untuk mengantisipasi masa paceklik nelayan tidak cepat mudah untuk melakukan diversifikasi usaha yang berbeda. Salah satunya adalah menjadi petani tambak, buruh tambak ataupun menjadi petani palawija.

Hal ini membutuhkan perubahan perilaku yang terbangun dari kebutuhan yang harus terpenuhi. Nelayan desa Sawojajar biasa menggunakan perlengkapan buatan sendiri, tidak mudah untuk menggunakan peralatan modern yang terkadang menyulitkan dalam usaha penangkapan ikan. Untuk itu nelayan Sawojajar tidak mudah untuk merubah sikap dalam upaya diversifikasi usaha penangkapan. Seperti yang diakui oleh beberapa informan bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup selama tidak melaut, bekerja sebagai buruh tambak (*nawu*/menguras tambak). Penghasilan yang diperoleh dari buruh adalah 20-25 ribu sehari (jam 8 samapai jam 4 sore). Selain itu untuk membantu keluarga anak dan istri juga bekerja serabutan.

Terdapat juga nelayan yang memiliki usaha dalam bidang pertanian menjadi petani bawang dan menyediakan jasa untuk memperbaiki perahu. Namun, banyak juga nelayan yang tidak dapat berbuat banyak karena tidak memiliki kemampuan dalam hal permodalan. Situasi ini menunjukkan usaha alternatif di luar nelayan sangat sulit.

Hubungan Kerja Dalam Organisasi Penangkapan

Hubungan kerja dalam organisasi penangkapan ikan pembagiannya adalah 50% untuk juragan dan 50% untuk nelayan tetapi pembagian ini setelah dipotong biaya produksi. Pola pembagian semacam ini masih berlaku sehingga sebenarnya nelayan mendapat beban ganda yaitu pendapatan yang lebih kecil dari yang semestinya karena nelayan mengeluarkan biaya non teknis yaitu waktu dan fisik. Permasalahan lainnya adalah jika nilai hasil tangkapan hanya 250.000 atau kurang dari nilai tersebut, maka kerugian produksi harus ditanggung pula oleh nelayan.

Pola pembagian di atas menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam hubungan kerjanya. Nelayan lebih banyak menjadi buruh sehingga nasibnya jauh lebih buruk. Demikian juga dalam pemilikan perahu, modalnya lebih terdahulu berhutang kepada pemilik modal. Akibatnya hasil tangkapan sebagian besar untuk membayar hutang kepada pemilik modal tersebut.

Ketergantungan Terhadap Okupasi Melaut

Ketergantungan terhadap sumber daya laut masih tinggi bagi masyarakat pesisir Desa Sawojajar. Nelayan masih mengandalkan hidupnya dengan melaut, walaupun kondisinya laut di pesisir pantai utara Jawa tidak lagi menjanjikan karena *overfishing*. Apalagi dalam kondisi angin barat yang tidak memungkinkan nelayan untuk melaut, nelayan hanya pasrah dan berdiam diri di rumah tanpa ada usaha yang lain. Seperti halnya yang diungkapkan oleh informan nelayan bahwa sebagian besar nelayan tidak mempunyai pilihan kerja lain selain melaut, akibatnya ketika musim paceklik secara ekonomi mereka menggantungkan kebutuhan hidupnya dari utang ke warung, jikapun ada alternatif usaha hanya sebagian kecil yang menjadi buruh serabutan seperti: buruh panen, tambak.

Penggunaan Peralatan Tangkap yang Tidak Ramah Lingkungan

Kondisi lingkungan Desa Sawojajar terutama di wilayah pesisir mengalami kerusakan terutama kondisi hutan mangrovenya. Situasi ini

diperparah oleh kebiasaan nelayan yang kurang mendukung terhadap perbaikan lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan jaring *trawl* (pukat harimau) seperti jaring *dogolan, arad*. Padahal dari DKP sendiri sudah melarang penggunaan jenis jaring tersebut. Secara tegas, DKP sudah mengeluarkan kebijakan tentang larangan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan alat tangkap laut yang tidak ramah lingkungan seperti arad, garok karena alat tersebut dapat merusak ekosistem laut, ikan kecil telur dan benih. Namun demikian, praktek penangkapan yang tidak ramah lingkungan tersebut masih terus berlanjut sampai sekarang.

Bahwa penggunaan jaring *arad* dapat merusak lingkungan dan mengurangi hasil tangkapan, para nelayan sebenarnya sudah mengalaminya. Walaupun penyebabnya tidak dominan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, namun dari hasil wawancara dengan para informan nelayan terungkap bahwa hasil tangkapan mereka dari tahun-ketahun mengalami pengurangan. Dengan demikian, situasi ini menunjukkan bahwa sosialisasi untuk membangun kesadaran nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan tidak efektif.

Kerusakan Ekosistem

Modernisasi perikanan membawa dampak yang signifikan terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan tradisional. Penggunaan alat tangkap modern yang tidak memperhatikan lingkungan telah menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem pesisir dan laut. Dalam hal ini, penggunaan jaring *trawl* atau pukat harimau menyebabkan hasil tangkapan nelayan tradisional berkurang.

Hal ini juga dialami nelayan Desa Sawojajar yang sebagian besar (85%) adalah nelayan tradisional menghadapi permasalahan penurunan hasil tangkapan. Kondisi ini disebabkan terjadinya perusakan ekosistem baik diakibatkan oleh nelayan itu sendiri maupun oleh alam. Namun kerusakan terparah disebabkan oleh nelayan yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem. Pencemaran laut akibat pembuangan sisa bahan bakar sering terjadi di pesisir Pantai Utara Desa Sawojajar. Akibatnya, mata rantai ekosistem laut semakin terganggu.

Kebiasaan nelayan yang menggunakan jaring arad yang tidak ramah lingkungan menambah semakin rusaknya ekosistem.

Kondisi dan kebiasaan nelayan yang demikian mendukung terjadinya kerusakan ekosistem yang terjadi di pesisir pantai utara Desa Sawojajar. Pihak DKP Kabupaten Brebes juga mengakui bahwa masalah krusial yang dihadapi masyarakat Desa Nelayan sebenarnya adalah kerusakan lingkungan dan terjadinya *overfishing*. Kondisi ini sulit untuk dipulihkan dalam jangka pendek meskipun beberapa upaya pemerintah telah dilakukan.

Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan

Faktor lain pemicu laju kemiskinan nelayan buruh ialah kebijakan pemerintah berupa motorisasi perahu dan peralatan tangkap modern, yang dikenal dengan nama “revolusi biru”. Kebijakan pemerintah ini telah mendorong timbulnya kegiatan tangkap berlebih dan pengurasan sumber daya perikanan di perairan pantai maupun di perairan lepas pantai. Banyak kasus konflik nelayan terjadi akibat kebijakan pemerintah ini telah memicu persaingan yang tidak sehat dan cenderung meminggirkan kaum nelayan tradisional. Dampak negatif kebijakan itu sangat dirasakan oleh rumah tangga-rumah tangga nelayan buruh dan memperparah situasi kemiskinan mereka secara umum.

Aspek lain yang juga sangat signifikan terhadap terpuruknya kehidupan nelayan adalah tingginya BBM, kebutuhan solar untuk melaut tidak lagi terjangkau oleh para nelayan tradisional. Hampir sebagian besar nelayan kecil mengeluhkan tingginya bahan bakar solar. Padahal bahan bakar ini merupakan sarana vital untuk mengarungi lautan dalam usaha menangkap ikan.

Kebijakan pembangunan yang saat ini yang diharapkan oleh masyarakat nelayan adalah pembuatan jalur pelabuhan kapal di Desa Sawojajar karena selama ini penyebab para nelayan merantau ke luar daerah adalah sulitnya kapal untuk berlabuh di Desa Sawojajar. Di saat musim kering terjadi pendangkalan sungai, sedangkan

musim hujan, arusnya tidak kuat, karena terbentur dengan sungai pamali (dekat pintu sungai).

Pemerintah sendiri sebenarnya pernah berencana membangun jalur perahu semacam pelabuhan dengan melakukan pengerukan di daerah "kalen dawa", namun karena ada penolakan dari petani tambak, maka rencana pembangunan tersebut dibatalkan.

Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan secara khusus juga dinilai oleh para informan belum signifikan. Pemerintah selama ini hanya memberikan bantuan berupa bantuan sembako dimasa peceklik (kebijakan umum).

Sistem Pemasaran

Persoalan besar lainnya yang setiap hari dihadapi para nelayan buruh ialah monopoli jaringan pemasaran hasil tangkapan. Bila musim ikan berlang-sung, belum tentu pendapatan para nelayan meningkat dengan sendirinya karena jaringan pemasaran dikuasai sepenuhnya oleh pedagang perantara. Hubungan para nelayan dengan pedagang perantara biasanya cukup erat. Para nelayan selalu membutuhkan uang tunai yang biasanya selalu disediakan oleh pedagang perantara dengan sistem pinjam berbunga tinggi. Oleh karenanya, para nelayan kerap dirugikan dalam hubungan tersebut. Peranan pedagang perantara dalam proses produksi dan pemasaran hasil tangkapan nelayan telah menggantikan kedudukan dan peranan organisasi formal seperti KUD Mina. Teknologi pengawetan hasil tangkapan pun biasanya dikuasai oleh pedagang perantara tersebut. Dengan demikian, turun naiknya harga ikan sangat bergantung pada kemauan pedagang perantara ini.

Selain itu terkait mekanisme pemasaran, posisi tawar nelayan secara umum lemah. Untuk mendapatkan kebutuhannya nelayan harus membeli dari penjual yang terjadi di banyak tempat selalu dimonopoli oleh penjual atau pengusaha tertentu. Dari sisi penjualan hasil tangkapan ikan, harga ikan lebih banyak ditentukan oleh bakul. Posisi nelayan sangat dilematis karena mereka (terpaksa) menjual ikannya dengan harga yang ditentukan oleh pedagang perantara. Walaupun seolah-olah harga ditentu-

kan berdasarkan penawaran atau melalui mekanisme lelang, tetap saja nilai jual hasil tangkapan nelayan telah dikendalikan oleh para pedagang. Nilai jual yang relatif rendah sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh nelayan sangat tinggi maka pendapatan bersih yang diperoleh nelayan akan sedikit. Sehingga *take home pay* yang diperoleh nelayan menjadi sangat kecil.

Dari penjelasan di atas terungkap bahwa peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak efektif. Menurut para informan nelayan, hasil tangkapan mereka langsung dijual ke bakul (tengkulak ikan) karena lebih mudah daripada kepada TPI. Hal ini disebabkan nelayan sudah terlanjur membuat ikatan perjanjian tertentu dengan para bakul.

Mekanisme pemasaran yang demikian jelas merugikan nelayan tradisional, keterikatan pada para bakul menjadikan nelayan mau tidak mau harus menjual hasil tangkapannya ke bakul. Kondisi ini telah melahirkan ketimpangan kesejahteraan yang mencolok antara nelayan yang dirugikan dan para bakul yang lebih diuntungkan.

Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan

Perusakan ekosistem telah mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan karena hal ini mengganggu keseimbangan sumber daya laut. Di pihak masyarakat nelayan sebenarnya telah ada upaya-upaya untuk merehabilitasi ekosistem pesisir yang telah rusak. Masyarakat sudah menyadari akibat perusakan terhadap lingkungan terutama hutan bakau. Masyarakat beserta petugas dari lingkungan hidup dan dinas kelautan berusaha terus menjaga dan mengawasi kelestarian hutan bakau yang masih baik. Perbaikan lingkungan yang dimulai dengan menanam kembali hutan *mangrove* seluas 20 ha di Desa Sawojajar menjadi bukti kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan memperbaiki ekosistem lebih yang lebih baik.

Namun, upaya rehabilitasi hutan mangrove tidak didukung dengan penegakan hukum yang tegas. Penggunaan jaring *arad* yang jelas-jelas merusak ekosistem belum mendapatkan tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum atau instansi terkait. Demikian pula penegakan hukum

terhadap perusakan hutan mangrove tidak mendapatkan tindakan tegas. Walaupun sudah ada petugas penjaga hutan, namun perannya tidak lebih sebagai pengawasan lingkungan. Akibat ketiadaan penegakan hukum yang tegas, potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh komunitas nelayan Desa Sawojajar semakin mengalami proses degradasi.

Keterbatasan peluang Kerja

Dalam menghadapi masa paceklik nelayan Sawojajar di hadapkan pada masalah yang cukup krusial. Tidak adanya kemampuan alternatif yang dimiliki menjadikan mereka sulit dalam mencari peluang kerja yang lain. Adanya keterbatasan peluang kerja, selain karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk usaha lain, nelayan juga terkadang pasrah terhadap kehidupannya. Ruang gerak para nelayan untuk berpindah ke profesi lain sudah kecil, karena secara umum masyarakat Sawojajar telah terpetak-petak menjadi petani darat, petani tambak dan nelayan. Sehingga masing-masing sudah ada bagiannya sendiri-sendiri.

Konflik kepentingan antara nelayan dan petambak dalam masalah rencana pembuatan pelabuhan juga semakin mempersulit kepentingan para nelayan. Di satu sisi, nelayan membutuhkan pelabuhan agar memudahkan nelayan untuk bersandar sehingga tidak perlu jauh di luar kota. Tetapi, disisi lain, menurut petambak pembuatan pelabuhan akan memakan areal mereka (masalah pembebasan lahan). Hal ini mengakibatkan peluang kerja nelayan semakin sempit karena sarana prasarana yang kurang mendukung.

PEMBAHASAN

Data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan kemiskinan di pedesaan pesisir lebih berat terhadap pedesaan agraris. Tekanan kemiskinan di komunitas desa nelayan mencakup faktor-faktor seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kelangkaan modal dan teknologi penangkapan, minimnya diversifikasi usaha penangkapan, pola hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang lebih menguntungkan pihak

juragan, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dampak penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem pesisir, kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan yang tidak memihak buruh nelayan, sistem pemasaran yang menguntungkan tengkulak, penegakan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan, dan langkanya peluang kerja. Sementara itu, tekanan kemiskinan di komunitas desa agraris hanya mencakup faktor keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan melakukan diversifikasi usaha pertanian, ketergantungan yang tinggi terhadap pekerjaan petani, kebijakan pembangunan yang tidak memberdayakan petani, sistem pemasaran hasil pertanian yang menguntungkan salah satu pihak, dan terbatasnya peluang kerja di sektor non-pertanian. Kompleksnya tekanan sosial ekonomi di wilayah desa pesisir menunjukkan bahwa desa nelayan merupakan wilayah kantong utama kemiskinan.

Diantara faktor-faktor pemicu kemiskinan, keterbatasan sumber daya manusia ditemukan baik di desa agraris maupun desa pesisir. Rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan keterampilan di luar pekerjaan petani atau nelayan telah menyebabkan minimnya kemampuan melakukan diversifikasi usaha dan ketergantungan yang tinggi pada pekerjaan bercocok tanam atau menangkap ikan. Temuan studi ini menguatkan hasil kajian Furkon (2009:1) yang melaporkan bahwa akar masalah kemiskinan nelayan berasal dari modal sumber daya nelayan yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan keterampilan. Karena derajat *human capital* yang rendah ini telah menyebabkan nelayan tidak mampu mengakses pekerjaan pada saat masa paceklik dan mengolah hasil tangkapan menjadi produk yang bernilai tinggi secara ekonomis.

Temuan menarik lainnya dari studi ini adalah faktor kebijakan publik berperan negatif terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kebijakan alokasi sumber daya baik untuk desa agraris dan desa pesisir ternyata gagal untuk memberdayakan posisi petani maupun nelayan. Tata niaga pupuk yang terjadi selama ini ternyata tidak berpihak pada organisasi dan kepentingan petani. Sementara itu, untuk konteks desa pesisir kebijakan publik yang

tujuannya untuk memfasilitasi modernisasi alat tangkap justru memicu kompetisi yang tidak sehat dengan nelayan tradisional sebagai pihak yang dirugikan. Situasi ini menunjukkan bahwa faktor institusi kebijakan berperan krusial dalam proses pemberdayaan dan pemerataan manfaat pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan (Rahman dan Westley, 2001:561; Njifonjou, et al, 2006:456). Akar masalah dari kegagalan kebijakan pengentasan kemiskinan tersebut dapat ditemukan dari kurang dipertimbangkannya faktor ketimpangan struktur kekuasaan (Green, 2006:1113; Bieri, 2009:11) dan ekosistem suatu wilayah (Namba, 2003:1; Samal, et al., 2003:157). Ketimpangan kekuasaan di pedesaan dan ekosistem masalah kemiskinan yang sangat kompleks dan sulit diatasi seringkali tidak mendapatkan perhatian dari perumus kebijakan. Akibatnya, banyak kebijakan kemiskinan justru menimbulkan efek kontraproduktif.

Temuan lain dari studi ini adalah sistem pemasaran hasil pertanian maupun tangkapan nelayan hanya menguntungkan pemilik modal. Situasi problematik ini telah menyebabkan posisi nelayan ataupun petani tidak berdaya. Indikasinya adalah petani atau nelayan harus menjual produk mereka dengan harga rendah tetapi harus membeli harga tinggi untuk input produksinya. Fakta ini menunjukkan bahwa kelompok miskin masih terisolasi dari pasar baik di tingkat lokal maupun nasional (Irz, et al, 2001:451). Menurut Rahman dan Westley (2001:560), akses pasar yang lebih baik untuk kelompok miskin seperti petani dan nelayan dapat dilakukan dengan pengembangan infrastruktur dan kelembagaan pasar yang ramah terhadap kepentingan nelayan dan petani.

Pengakuan hukum lingkungan yang lemah terhadap praktek *overfishing* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan pantai utara Jawa adalah faktor pemicu kemiskinan yang khas yang ditemukan pada komunitas desa nelayan. Lingkungan pantai yang rusak ditengarai menyebabkan penurunan kesejahteraan nelayan karena minimnya hasil tangkapan laut. Berbeda dengan kondisi lahan pertanian pada masyarakat agraris, walaupun kondisinya juga parah namun relatif dapat mudah diperbaiki dengan pembuatan sarana irigasi yang memadai. Data hasil studi ini menguatkan studi yang

dilakukan oleh (Kusnadi, 2003:115) bahwa rusaknya lingkungan pesisir memberikan dampak yang besar terhadap proses pemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

SIMPULAN

Studi ini menambahkan pengetahuan baru mengenai studi formulasi kebijakan publik untuk memahami akar kemiskinan. Dengan pendekatan multi dimensional terhadap masalah kemiskinan, studi ini menunjukkan bahwa faktor konteks atau lingkungan kebijakan memberikan implikasi yang berbeda terhadap gejala kemiskinan di wilayah pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa komunitas nelayan ditemukan sebagai komunitas yang dihuni oleh kelompok miskin yang lebih besar daripada komunitas agraris. Hal ini dikarenakan akar penyebab kemiskinan di desa nelayan mencakup atribut individual (rendahnya pendidikan), struktur ekonomi politik (sistem pemasaran dan kebijakan yang tidak memihak nelayan) dan ekologi (kerusakan lingkungan pesisir akibat praktek penangkapan ikan yang destruktif dan eksploitatif). Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik di masa yang akan datang perlu memperhatikan variasi perbedaan konteks lokasi dan tidak lagi mengadopsi strategi "satu pendekatan untuk semua masalah".

Bukti empirik menarik lainnya dari studi ini adalah strategi kebijakan publik di masa lalu dalam rangka pengentasan kemiskinan ternyata tidak efektif memberdayakan komunitas miskin. Kegagalan ini terjadi karena lembaga pelaksana kebijakan tidak mampu mengendalikan kooptasi elit dalam perebutan sumber daya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan ini adalah kemiskinan terjadi karena struktur kekuasaan yang terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu. Oleh karena itu, formulasi kebijakan publik untuk menanggulangi kemiskinan haruslah sensitif terhadap konteks kekuasaan yang tidak berimbang.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim, 2007. *Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007*. **Berita Resmi Statistik** No. 38/07/Th. X, 2 Juli 2007, BPS.

- Ashley, Caroline dan Simon Maxwell, 2001. *Rethinking Rural Development*. Development Policy **Review**, Vol.19, No. 4 :395-425.
- Bieri, Sabin. 2009. *Power and Poverty: Reducing Gender Inequality by Ways of Rural Employment?* **Paper** presented at the FAO-IFAD-ILO Workshop on Gaps, trends and current research in gender dimensions of agricultural and rural employment: differentiated pathways out of poverty, Rome.
- Bradshaw, Ted K. 2007. *Theories of Poverty and Anti Poverty Programs in Community Development*. **Journal** of the Community Development Society (Spring) Vol. 38 No.1: 7-25.
- Easton, David. 1992. "Categories for the Systems Analysis of Politics" in Bernard Susser, *Approaches to the Study of Politics*, Prentice Hall, USA.
- Furkon, Ukon Ahmad, 2009. *Kajian Kemiskinan pada Komunitas Nelayan di Cirebon, Lampung Selatan, dan Cilacap Dengan Pendekatan Participatory Poverty Assessment*. Master **Thesis** - Development Studies, ITB.
- Green, Maia. 2006. *Representing Poverty and Attacking Representations: Perspectives on Poverty from Social Anthropology*. **Journal** of Development Studies, Vol. 42, No. 7, 1108–1129.
- Irz, Xavier, Lin Lin, Colin Thirtle, dan Steve Wiggins, 2001. *Agricultural Productivity Growth and Poverty Alleviation*. Development Policy **Review**, Vol. 19 No. 4 : 449-466.
- Kusnadi, 2006. *Akar Kemiskinan Nelayan*. LKis. Yogyakarta.
- Namba, Anton, 2003. *Pendekatan Ekosistem dalam Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Tengah*. **Jurnal** Ekonomi Kerakyatan. Vol. 2, No. 1.
- Njifonjou, et al, 2006. *Fisheries Co-Management and Poverty Alleviation in the Context of the Sustainable Livelihoods Approach: A Case Study in the Fishing Communities of Aby Lagoon in Cote d'Ivoire*. International **Journal** of Sustainable Development and World Ecology Vol. 13: 448-458.
- McCulloch, et al, 2007. *Pathways Out of Poverty during an Economic Crisis: An Empirical Assessment of Rural Indonesia*. **Working Paper** Series No. 4173. World Bank.
- Rahman, Atiqur dan John Wesley, 2001. The Challenge of Ending Rural Poverty. *Development Policy Review*, Vol. 19, No. 4: 553-562.
- Sujarwoto dan Tri Yumarni, 2007. *Desa Rawan Pangan: Kritik Terhadap Kebijakan Pangan Nasional dalam Konteks Pembangunan Pedesaan Indonesia*. **Jurnal** Administrasi Publik . FIA- Universitas Brawijaya, Malang. Vol. VII. No. 2.